

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA  
DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

Nama : Susan Elseline Widjaja  
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.  
H. Sudarsono, S.H., M.S.

**ABSTRAK**

Kehidupan ketatanegaraan yang demokratis tidak akan pernah lepas dari kedudukan lembaga perwakilan rakyatnya khususnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan besar dan krusial dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian pengaturan yang mendasari wewenang, tugas, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat harus berkesinambungan dan tidak bergesekan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat terakhir adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berlakunya Undang – Undang tersebut memicu banyak kontroversi diseluruh penjuru negeri sehingga di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Terlepas dari politik hukum pembentuk undang – undang, harus kita terima bersama bahwa undang – undang selain dari produk hukum juga adalah produk politik. Selalu ada kepentingan dan konsensus politik di setiap pembentukan peraturan perundang – undangan. Terlebih jika Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang – undang membuat undang – undang yang isinya mengatur dirinya sendiri dan kewenangannya. Secara alamiah pastinya akan memiliki kecenderungan untuk memperkuat dan memperluas apa yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2018 ini perlu dikawal oleh semua pihak agar secara implementasi tidak merugikan pihak – pihak tertentu. Transparansi pembentukan undang – undang dirasa diperlukan agar masyarakat tidak kaget dengan undang – undang yang tiba – tiba muncul dan dirasa jauh dari rasa keadilan.

Kata Kunci : dewan perwakilan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, uu no. 2 tahun 2018

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA  
DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

Nama : Susan Elseline Widjaja  
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.  
H. Sudarsono, S.H., M.S.

**ABSTRACT**

Democratic constitutional life will never be separated from the position of the representative body of its people, especially the People's Representative Council of Indonesia. Large and crucial powers are owned by the People's Representative Council. Thus the arrangements underlying the authority, duties and membership of the House of Representatives must be sustainable and not overlap against the principles of democracy and sovereignty and the Constitution of the Republic of Indonesia Year of 1945. The last law concerning the People's Representative Council is Law Act Number 2 Year 2018. The enactment of the Law triggered a lot of controversy throughout the country so that it was judicially reviewed by the Constitutional Court of Indonesia which finally issued a Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018. Apart from the legal politics of the legislators, we must accept together that laws other than legal products are also political products. There is always political interest and consensus in the formation of laws and regulations. Especially if the People's Representative Council is the legislator draws the law that regulates itself and its authority. Naturally it will certainly have a tendency to strengthen and expand what is under its authority. Therefore, the existence of Law Act Number 2 Year 2018 needs to be escorted by all parties so that implementation does not harm certain parties. Transparency in the formation of laws is deemed necessary so that people are not surprised by laws that suddenly appear and are far from feeling of justice.

Keywords : people's representative council, people's representative institutions, law act number 2 year 2018